

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah, SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya , penyusunan Laporan Kinerja OPD Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja OPD ini disusun sebagai pertanggung jawaban apa yang telah dilaksanakan pada tahun 2023, sehingga dengan disusunnya laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan dan dapat menjadi bahan tindak lanjut untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Laporan Kinerja OPD Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka baik langsung maupun tidak langsung, kritik serta saran yang bersifat membangun tetap kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan rencana kerja Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka di masa yang akan datang.

Akhir Kata, semoga Allah, SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Bakam, Januari 2024

CAMAT BAKAM,



RIDWAN, S.PKP

PENATA TK.I

NIP. 19791015 201001 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB. I. PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Gambaran Umum Organisasi.....	4
1. Susunan Organisasi.....	4-5
2. Kondisi Pegawai dan Kondisiasi Sarana Prasarana.....	5-10
3. Maksud dan Tujuan	10-11
C. Tugas dan Fungsi.....	11
D. Isu Strategis.....	11-14
E. Hukum.....	14-15
F. Sistematika	15
BAB. II. PERENCANAAN KINERJA	16
A. Rencana Strategis	16
1. Tujuan Organisasi.....	17
2. Sasaran dan Indikator Sasaran.....	17-18
B. Indikator Kinerja Utama	18-19
C. Perjanjian Kinerja	19-20
BAB. III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Kerangka Pengukuran Kinerja	21-22
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	23
C. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	24-37
D. Akuntabilitas Keuangan	37-39
BAB IV. PENUTUP	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Rencana Tindak Lanjut.....	40
LAMPIRAN : Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2023 Laporan Capaian Kinerja OPD Tahun 2023	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu tuntutan reformasi yang diinginkan oleh seluruh masyarakat adalah reformasi birokrasi melalui penyempurnaan system dan prosedur birokrasi, diantaranya dengan cara penyederhanaan prosedur birokrasi, pelayanan satu atap dan kemudahan perolehan informasi oleh masyarakat, yang kesemuanya mengarah pada sistem pelayanan masyarakat yang prima. Selanjutnya dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi serta menciptakan organisasi yang bersih dan bertanggung jawab, maka untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Susunan Organisasi

Kecamatan Bakam merupakan salah satu kecamatan dari 8 (delapan) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka yang terdiri dari 9 (sembilan) Desa yakni Desa Bukit Layang, Desa Mabat, Desa Mangka, Desa Bakam, Desa Dalil, Desa Tiang Tarah, Desa Neknang, Desa Kapuk dan Desa Maras Senang, dimana dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Bangka merupakan satuan kerja yang mempunyai fungsi sebagai perencana, pelaksana, pelapor dan pengawas yang terintegrasi dan tepat waktu berdasarkan data yang up to date dan akurat yang bertanggung jawab langsung kepada perangkat daerah kabupaten.

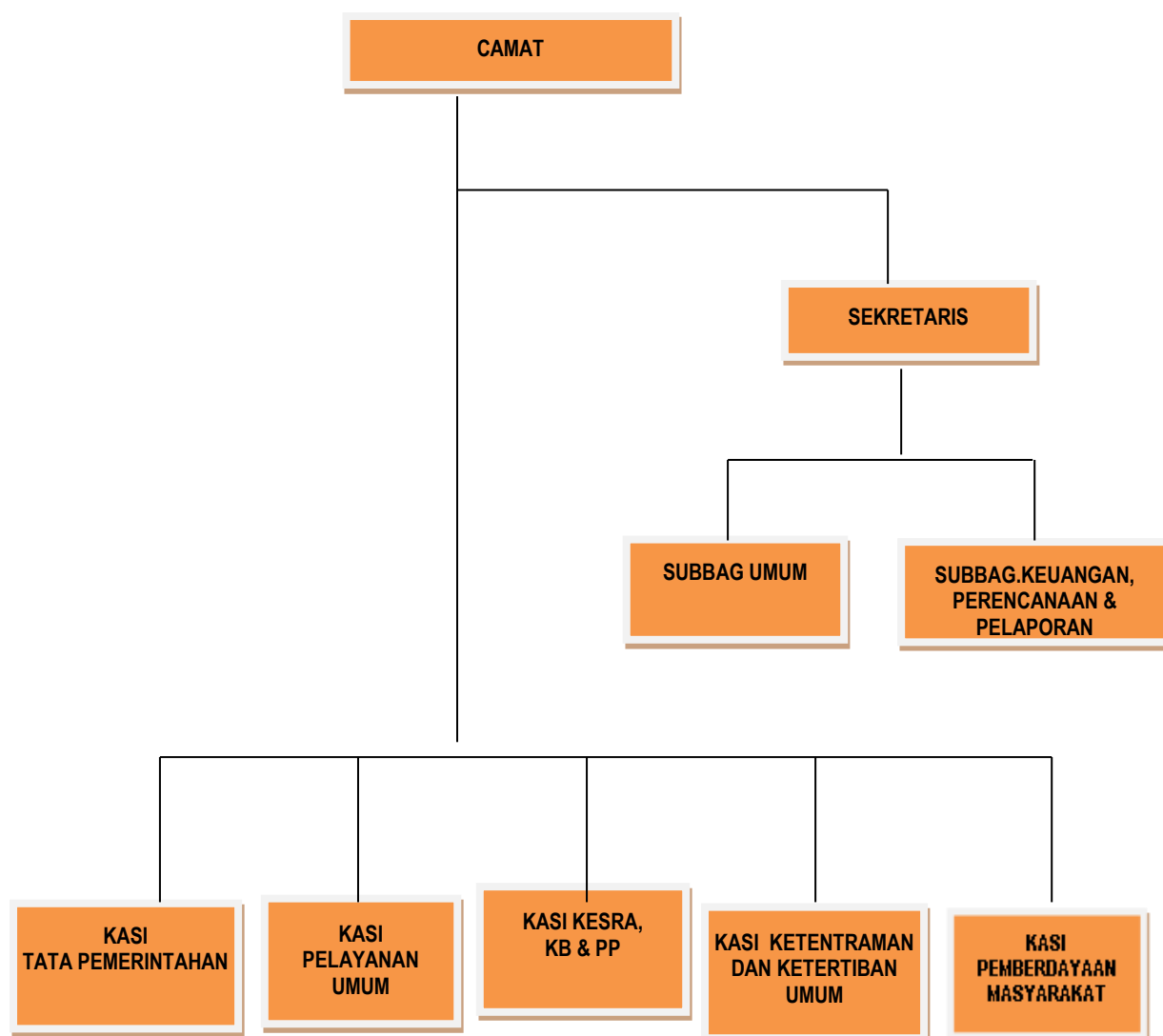
Dalam pelaksanaan kegiatan OPD bertujuan untuk mencapai sasaran pembangunan dengan indikator yang telah terukur melalui Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) guna mendukung Visi dan Misi “Bangka Setara”, yang mana Visi dan Misi tersebut telah dicanangkan oleh Kepala Daerah periode tahun 2019-2023 yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Tahun anggaran 2023 merupakan tahun kelima masa Renstra periode 2019- 2023, sehingga kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023 diharapkan dapat menjadi indikator dalam memenuhi pencapaian target kinerja sasaran yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis OPD Kantor Kecamatan Bakam.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka dan Peraturan Bupati Bangka Nomor : 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka, dimana Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- e. Seksi Kesra, KB dan PP
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
- g. Seksi Pelayanan Umum

Lebih lanjut susunan Organisasi Kantor Kecamatan Bakam digambarkan sebagai berikut :



2. Kondisi Pegawai dan Kondisi Sarana Prasarana.

2.1. Kondisi Pegawai

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, saat ini OPD Kantor Kecamatan Bakam memiliki pegawai sebanyak 29 orang, yang terdiri dari 15 orang PNS yang bekerja pada Kantor Kecamatan Bakam, dan 14 orang

Tenaga Kontrak, dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Bangka Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) maka kondisi pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Bakam belum cukup memadai, sehingga harus ada penambahan jumlah pegawai.

Lebih lanjut kondisi pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Bakam per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka Berdasarkan Golongan
Tahun 2023

Golongan	a	b	c	d	Jumlah (Orang)
I	-	-	-	-	0
II	-	-	-	-	0
III	2	2	5	5	14
IV	1	-	-	-	1
Jumlah Total					15

Sumber : kasubbag umum dan kepegawaian kec.bakam

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Struktural	9
2	Jabatan Fungsional	-
3	Tenaga Teknis Lainnya	-
4	Arsiparis	-
5	Staf Administrasi/Fungsional Umum	6
JumlahTotal		15

Sumber : kasubbag umum dan kepegawaian kec.bakam

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Kecamatan Bakam
Kabupaten Bangka Berdasarkan Pendidikan Tahun 2023

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	-
3	S1/DIV	14
4	D III	-
5	D I	-
6	SLTA	1
7	SLTP	-
8	SD	-
JumlahTotal		15

Sumber : kasubbag umum dan kepegawaian kec.bakam

2.1. Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan Kantor Kecamatan Bakam untuk saat ini dinilai belum cukup memadai untuk mendukung berbagai kegiatan yang ada di Kecamatan, terlebih dengan dilaksanakannya kegiatan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dimana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibutuhkan ruangan yang refrenstatif dan kendaraan operasional yang cukup demi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Lebih lanjut kondisi sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Bakam diterangkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Data Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Bakam
Per 31 Desember 2023

No	Sarana Prasarana	Kondisi (B/KB/RB)	Jumlah
1	Tanah bangunan kantor pemerintah	B	1
2	Portable generating set	B	1
3	Pompa air	B	1
4	Kendaraan roda empat	B	1
5	Kendaraan roda empat	B	1

6	Kendaraan roda dua	KB	1
7	Kendaraan roda dua	KB	1
8	Kendaraan roda dua	B	1
9	Kendaraan roda dua	B	1
10	Kendaraan roda dua	B	1
11	Kendaraan roda dua	B	1
12	Sepeda motor	B	1
13	Mesin kalkulator	B	5
14	Rak kayu	B	2
15	Rak kayu	B	1
16	Filling besi/metal	KB	1
17	Filling besi/metal	KB	1
18	Filling besi/metal	KB	1
19	Filling kabinet	B	2
20	Lemari	B	2
21	Lemari kaca	B	1
22	Lemari kaca	B	1
23	Lemari kaca	B	2
24	Brankas	B	1
25	Papan DURK	B	1
26	Papan struktur organisasi	B	1
27	Papan nama camat, sekcab dan 4 kasi	B	6
28	White board	B	2
29	Lain-lain/mesin potong kertas	B	1
30	Meja kerja	B	2
31	Tempat tidur	B	2
32	Meja rapat	B	1
33	Meja rapat	KB	1
34	Meja makan prasmanan	B	2
35	Meja makan	B	1
36	Kursi rapat	B	31
37	Kursi kerja	B	5
38	Kursi kerja	B	1
39	Kursi putar	B	1
40	Kursi kerja	B	3
41	Kursi kerja	B	2
42	Kursi tunggu	B	1
43	Meja computer	B	1
44	Meja computer	B	2
45	Sofa	B	1
46	Sofa	B	1
47	Lemari pakaian	B	1
48	AC unit	B	1
49	AC unit	B	1
50	AC	B	2

51	AC unit	B	2
52	AC unit	B	1
53	AC unit ½ PK	B	1
54	AC unit 1,5 PK	B	1
55	Kipas Angin	B	1
56	Kipas Angin	B	2
57	Kompor Gas	B	1
58	Tabung Gas	B	1
59	Televisi	B	1
60	Stabilizer	B	1
61	Stabilizer	B	2
62	Unit Power Supply	B	2
63	Unit Power Supply	B	3
64	Tiang bendera	B	1
65	Tangga aluminium	B	1
66	Teralis jendela	B	20
67	Vacum cleaner	B	1
68	Kain rampel	B	4
69	Teralis jendela	B	31
70	Receiver	B	1
71	Teralis	B	20
72	PC unit	B	2
73	Laptop	B	1
74	Laptop	B	1
75	Laptop	B	1
76	Laptop	B	1
77	Printer	B	1
78	Scanner	B	1
79	GPS	B	1
80	Meja kerja	B	5
81	Meja kerja	B	7
82	Kursi pimpinan	B	1
83	Proyektor + attachment	B	1
84	Microphone/wireless Mic	B	2
85	UPS	B	2
86	Mesin press/laminating	B	1
87	Kantor camat bakam (I)	B	1
88	Kantor camat bakam (II)	B	1
89	Bangunan gedung kantor permanen I	B	1
90	Gedung serba guna kec.bakam	B	1
91	Tempat parkir kendaraan	B	1
92	Pagar gedung kantor	B	1
93	Rumah dinas camat bakam	B	1
94	Rumah dinas sekcab bakam	KB	1
95	Rumah dinas kecamatan bakam	KB	1

96	Jaringan air bersih kantor camat bakam	B	1
97	Alat penangkal petir	B	1
98	Pengadaan instalasi Listrik	B	1
99	Jaringan Listrik	B	1
100	Papan nama/merk	B	1
101	Meja kerja	B	1
102	Kursi kerja	B	1
103	Laptop	B	1
104	Termometer infrared (coolpad)	B	1
105	Sprayer (polar)	B	3
106	Kursi rapat	B	50
107	Laptop	B	1
108	Laptop acer	B	1
109	Mesin Rumput	B	1
110	Printer	B	1
111	Meja rapat	B	2
112	Kursi kerja (kursi putar)	B	4
113	Kursi rapat	B	50
114	Meja kerja	B	4
115	Printer	B	2
116	Laptop	B	1

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud

Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dalam Menyusun Laporan Kinerja bermaksud untuk dapat dijadikan :

- Bahan Evaluasi pelaksanaan sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya;
- Bahan untuk menentukan langkah - langkah yang harus dilaksanakan dalam upaya pencapaian target Kinerja Sasaran, Kinerja Kegiatan dan Kinerja Keuangan di tahun-tahun berikutnya.

3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Kinerja OPD Kantor Kecamatan Bakam adalah:

- Sebagai laporan kinerja instansi Kantor Kecamatan Bakam dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan sasaran dan kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra OPD.

- b. Untuk mengetahui tingkat Capaian Target Kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra OPD ;
- c. Sebagai Pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan OPD Kantor Kecamatan Bakam dalam satu tahun.

B. Tugas dan Fungsi

Kantor Kecamatan Bakam mempunyai Tugas dan Kewajiban membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dengan fungsi :

1. Melakukan identifikasi potensi lokal di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah dilimpahkan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat;

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi.

D. Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dan dinamika lingkungan strategis sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)
Birokrasi Pemerintah daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan perkembangan dan perubahan kebijakan serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah. Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan ditingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicanangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN.

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*service excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan

komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan *Public Complaint*. Sumber daya aparatur merupakan asset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Goverment*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma sebagai “*Pelayan Masyarakat*”. Selain itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel dan peningkatan efektifitas dan efesiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur pemerintah Kantor Kecamatan Bakam dalam makna lain adalah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur pemerintah kabupaten, melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor Penyelenggaraan Negara (*Public Service Reform*) dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.

3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Goverment*) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan Kelembagaan/Organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan, sedangkan Penyelenggaraan Manajemen Publik menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik

yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan dan Kelurahan, OPD dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Bangka dan masyarakat umum sebagai Stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna dan lain lain, serta Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan sebagai Shareholder. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan publik perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki *Reward and Punishment System* perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada *Entrepreneur Management* yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kepada kinerja bukan kebijakan. Sistem Manajemen Keuangan Daerah (*Financial Management System*) merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran akan dilakukan dengan mendasarkan konsep *Value*

for Money sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*).

Manajemen barang daerah meliputi beberapa tahapan yaitu : Perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan asset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif.

Sasaran Strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan Pengelolaan Barang Daerah, antara lain adalah :

1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang investasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan system pelaporan
2. Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah,
3. Pengamanan barang daerah,
4. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

E. Hukum

LAKIN Kantor Kecamatan Bakam ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka
8. Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2016 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2014 – 2018;
9. Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Organisasi, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi OPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Rencana Strategis OPD, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran Kinerja, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis, dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Negara PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan juga Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai PermenPANRB Nomor 53 Tahun 2014.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka. Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019-2023.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Bupati terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tersebut ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dengan melibatkan *Stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Didalam Renja Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada 1 (satu) tahun mendatang.

1. Tujuan Organisasi

1.1 Tujuan Organisasi

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan hasil (result) yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Adapun tujuan Organisasi Kantor Kecamatan Bakam dalam rangka pencapaian visi, misi tersebut adalah sebagai berikut :

“ Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan Bakam ”

2. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

2.1 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata oleh OPD Kecamatan dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Berdasarkan Hasil Pemetaan Visi Misi rancangan awal RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Sasaran yang hendak dicapai Kantor Kecamatan Bakam sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa di Kecamatan Bakam
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah

2.2 Indikator Kinerja Sasaran

Indikator kinerja Kantor Kecamatan Bakam adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Kecamatan Bakam dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Adapun indikator kinerja dimaksud adalah :

- a. Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)
- b. Hasil Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah
- c. Persentase Hasil Temuan Pengelolaan Keuangan yang selesai ditindaklanjuti

Tabel 2.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA
KANTOR KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target per tahun				
			Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan Bakam		Persentase Desa Maju	83	85	88	91	93
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa di Kecamatan Bakam	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	33%	50%	83%	83%	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Layanan Pemerintahan yang Akuntabel		Indeks Reformasi Birokrasi					
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Kecamatan Bakam	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan	CC	B	BB	BB	BB

C. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Ada beberapa indikator kinerja yang tidak dimasukkan ke Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain : Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan karena merupakan unsur pendukung rutin di Kecamatan.

Berikut ini Tabel Indikator Kinerja Utama Kantor Kecamatan Bakam :

Tabel. 2.2

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	Perbandingan antara jumlah Desa yang berkembang dan tidak berkembang sesuai Permendagri 81/2015 x 100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah	Perbandingan antara jumlah pelayanan yang sesuai SOP dengan jumlah seluruh pelayanan x 100%

C. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, serta Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2023. Berdasarkan hasil review pada Perjanjian Kinerja (PK) Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (outcome)

pada Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN				
OPD		: KECAMATAN BAKAM		
TAHUN ANGGARAN		: 2023		
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pengelolaan Dan Pemanfaatan Potensi Desa	1. Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	%	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	1. Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bakam	Kategori	BB 71,76

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Misi dan Visi Kantor Kecamatan Bakam.

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran

atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRETASI
1.	> 100 %	Melebihi/Melampaui Target
2.	=100 %	Sesuai Target
3.	< 100 %	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2023 hasil review dan Indikator Kinerja Utama OPD berdasarkan Keputusan Camat Bakam Kabupaten Bangka, telah ditetapkan 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa, terdiri dari 1 Indikator :

1. Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah, terdiri dari 1 Indikator :

1. Nilai Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bakam

B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan *Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %	RENSTRA (2023)	
						TARGET	CAPAIAN (%)
1.	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	%	100	100	100	100	100
2.	Hasil Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah	Indeks	BB (71,76)	100	100	BB (71,76)	100
RATA-RATA CAPAIAN IKU					100		

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukkan pada semua indikator.

Untuk mendapatkan capaian kinerja pada Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015) sesuai dengan hasil yaitu Persentase Desa yang Menindaklanjuti Hasil Monitoring Desa sebanyak 9 (Sembilan) Desa, Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga Trantibum sebesar 100%, Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina sebesar 100% dan Persentase Pelayanan yang diselesaikan sebesar 100%. Sedangkan Capaian Kinerja pada indikator Nilai Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Bakam dilaksanakan dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan.

C. PENGUKURAN, EVALUASI dan ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Secara umum Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2023. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan, dari 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN %
1.	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	%	100	100	100
2.	Hasil Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah	Indeks	BB (71,76)	100	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas dapat diperoleh data dan informasi Kinerja Kecamatan :

Tabel 3.3
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN
KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/Melampaui Target	-
2.	Sesuai Target	100%
3.	Tidak Mencapai Target	-

Dari sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.4
PENCAPAIAN TARGET SASARAN

NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR SASARAN	TINGKAT PENCAPAIAN					
			MELAMPAUI TARGET (>100%)		SESUAI TARGET (100%)		BELUM MENCAPAI TARGET (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	SASARAN 1	1	-		1	100	-	
2.	SASARAN 2	1	-		1	100	-	
JUMLAH		2	-		2	100	-	

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan masa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan pembandingan-pembandingan antara lain :

- Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan kinerja jangka panjang/jangka pendek.

Selanjutnya Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 2 indikator kinerja dari 1 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka tahun 2019 – 2023, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa

Tabel 3.5
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 1
MENINGKATNYA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI DESA

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2022		TAHUN 2023		%	TAHUN 2024		%
			TARGET	%	TARGET	%		TARGET		
1.	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	%	83	100	100	100	100	100		100

Sasaran meningkatnya *Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa* dapat dilihat dari 1 (satu) indikator :

1. Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)

1. Analisis pencapaian Indikator Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)

Capaian Kerja nyata Indikator Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015) yang ditargetkan adalah 100% dari target yang direncanakan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023, sehingga capaian kinerjanya adalah 100% Selama tahun 2023. Data penunjang capaian kinerja indikator Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015) yang mencakup langsung pada 5 (lima) Program yang mana dilaksanakan pada 5 (lima) seksi yaitu sebagai berikut :

1. Seksi Pelayanan Umum
2. Seksi Tata Pemerintahan
3. Seksi Kesra, KB dan PP
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik, dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 adalah 100% dengan realisasi 100%.

Berdasarkan capaian indikator Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015) di Kecamatan Bakam, maka dapat disimpulkan bahwa presentase kinerja tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan

Capaian kinerja yang dicapai sudah mencapai hasil yang baik dari target yang di rencanakan pada tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%. Capaian tersebut dari jumlah keluhan/pengaduan yang diterima sampai ditindaklanjuti, dan dari jumlah dokumen yang dikeluarkan sesuai SOP dan tepat waktu selama tahun 2023, sajian data keluhan/pengaduan dan jumlah dokumen yang dikeluarkan sesuai SOP bisa dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.6
DATA KELUHAN/PENGADUAN
KECAMATAN BAKAM TAHUN 2023

NO	KOMPONEN	JUMLAH PENGADUAN	JUMLAH SELESAI DITINDAK LANJUTI	PROSENTASE
1.	Kecamatan Bakam	-	-	100%
2.	Desa Bukit Layang	-	-	100%
3.	Desa Mabat	-	-	100%
4.	Desa Mangka	-	-	100%
5.	Desa Bakam	-	-	100%
6.	Desa Dalil	-	-	100%
7.	Desa Tiang Tara	-	-	100%
8.	Desa Neknang	-	-	100%
9.	Desa Kapuk	-	-	100%
10.	Desa Maras Senang	-	-	100%

Sedangkan untuk pelayanan administrasi berupa dokumen perizinan dan non perizinan tahun 2023 pada Kecamatan Bakam bisa lihat seperti pada tabel :

Tabel 3.7
DATA PROSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI KECAMATAN
SESUAI SOP/TEPAT WAKTU
TAHUN 2023

NO	JENIS PELAYANAN	JUMLAH PELAYANAN	PELAYANAN SESUAI SOP/TEPAT WAKTU	PELAYANAN TIDAK SESUAI SOP/TIDAK TEPAT WAKTU	%
1.	Kartu Tanda Penduduk	25	25	-	100
2.	Kartu Keluarga	934	934	-	100
3.	SKCK	302	302	-	100
4.	Akta Kelahiran	268	268	-	100
5.	Akta Kematian	134	134	-	100
6.	Keterangan Pindah Jiwa	532	532	-	100
RATA-RATA					100

2. Persentase Lembaga Masyarakat Yang Aktif

Capaian kinerja sudah sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 100% dengan realisasi 100%. Pengukuran kinerja ini dihitung dari beberapa pelaksanaan kegiatan seperti : terlaksananya musrenbang tingkat kecamatan 1 kali, musrenbang tingkat Desa sebanyak 9 Desa, pembinaan Lembaga kemasyarakatan sebanyak 9 Desa, pelaksanaan lomba desa tingkat Kecamatan 1 kali yang di ikuti sebanyak 9 Desa. Untuk lebih jelas capaian Lembaga Masyarakat yang aktif bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
DATA LEMBAGA KEMASYARAKATAN YANG AKTIF
DI WILAYAH KECAMATAN BAKAM TAHUN 2023

No	Desa	Nama Lembaga Yang Aktif				
		BPD	LPM	PKK	RT	RW
1	Bukit Layang	√	√	√	√	√
2	Mabat	√	√	√	√	√
3	Mangka	√	√	√	√	√
4	Bakam	√	√	√	√	√
5	Dalil	√	√	√	√	√
6	Tiang Tara	√	√	√	√	√
7	Neknang	√	√	√	√	√
8	Kapuk	√	√	√	√	√
9	Maras Senang	√	√	√	√	√

Terkait capaian indikator pada kegiatan ini bisa dilihat seperti pada tabel :

Tabel 3.9
PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR
Koordinasi Pemberdayaan Desa

No	Indikator	Target	Realisasi
1.	Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	100%	100%
	Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	100%	100%
	Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec	100%	100%
	Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam gotong royong	100%	100%

3. Persentase Desa Yang Masyarakatnya Aktif Menjaga Trantibum Secara Swadaya

Capaian kinerja sudah sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100 % dengan realisasi 100% sehingga capaiannya 100%, terkait capaian indikator pada kegiatan ini bisa dilihat seperti pada tabel.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.4.0
PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Indikator	Target	Realisasi
1.	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum	100 %	100 %

4. Persentase Desa Yang Tertib Administrasi (Permendagri 47/2016)

Capaian indikator sudah sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 100% dimana realisasinya sebesar 100%. Capaian tersebut diperoleh dari jumlah desa yang tertib administrasinya dibagi dengan jumlah desa yang ada di Kecamatan Bakam, lebih jelas bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Persentase capaian indikator
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Indikator	Target	Realisasi
1.	Persentase Desa/Kel yang melakukan up dating profil desa sesuai standar	100%	100%
	Persentase Desa/Kel yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa	100%	100%

Tabel. 4.2
DATA PROSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MEMENUHI
STANDAR KRITERIA BAIK

Kriteria	Desa								
	Bukit Layang	Mabat	Mangka	Bakam	Dalil	Tiang Tara	Neknang	Kapuk	Maras Senang
Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Capaian serapan anggaran desa (APBdes)/kelurahan 70 – 96%	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Kondisi halaman kantor bersih, bebas dari rumput/gulma per triwulan	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Cakupan RT desa/kelurahan yang memiliki jamban minimal 85%	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Rasio perpustakaan desa/kelurahan 1 : 1	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Jumlah Kelurahan yang memenuhi kriteria baik	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Berdasarkan data diatas, maka dapat diambil satu kesimpulan : semua desa di wilayah Kecamatan Bakam telah memenuhi kriteria baik karena semua desa memenuhi minimal 4 kriteria baik, sehingga tingkat capaiannya 100%.

Capaian kinerja sasaran 1 (satu) ini didukung oleh 4 (empat) Program, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

dimana output semua program tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	MENUNJANG/ KURANG	Target%
1.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	12.845.000	11.300.000	Persentase Ketepatan Waktu Dalam Pelayanan	Sangat menunjang	100
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	12.845.000	11.300.000	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	Sangat menunjang	12 laporan
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	110.735.630	106.807.280	1. Persentase Lembaga kemasyarakatan yang dibina	Sangat Menunjang	100
					2. Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam Musrenbang	Sangat Menunjang	100
					3. Persentase Desa yang mengikuti Lomba Desa/Kel Tk.Kec.	Sangat Menunjang	100
					4. Persentase Desa yg masyarakatnya aktif dalam gotong royong	Sangat menunjang	100

		Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.320.000	9.605.000	1. Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Sangat Menunjang	63 lembaga
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.415.630	97.202.280	1. Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	Sangat menunjang	26 laporan
3.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.300.000	7.850.000	Persentase Tomas/Toga/Topa yang berperan aktif menjaga trantibum	Sangat menunjang	89
		Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	8.300.000	7.850.000	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Sangat menunjang	24 laporan
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa.	37.132.000	29.742.000	1. Persenstase Desa/Kel yang melakukan up dating profil desa sesuai standar 2. Persentase Desa/Kel yang menindaklanjuti hasil monitoring keuangan desa	Sangat Menunjang Sangat Menunjang	100 100
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	38.850.000	38.850.000	1. Jumlah dokumen yang di fasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagun	Sangat menunjang	207 dokumen

					aan aset desa		
		Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.500.000	6.291.000	1. Jumlah Desa yang dibina pengelolaan aset dan keuangan	Sangat menunjang	1 dokumen

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran *Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa* disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Dana yang cukup memadai;
2. Sarana yang cukup untuk mendukung kegiatan;

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya ketersediaan anggaran untuk mendukung capaian target yang telah ditetapkan ;
2. Kurang kesadaran masyarakat menengah ke atas untuk mau berpartisipasi dalam menyampaikan informasi pembangunan;
3. Kurangnya data dalam perencanaan awal pembangunan di desa;
4. Sulitnya kesadaran masyarakat untuk memahami data-data yang diperlukan dalam merencanakan pembangunan;

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan tersebut :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang berinteraksi;
2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi untuk selalu aktif dan membantu dalam pembangunan;
3. Mampu memberikan solusi kepada masyarakat dalam menghadapi kesulitan/kendala untuk data-data pembangunan;

Sasaran 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah

Tabel 3.4
ANALISIS PENCAPAIAN SASARAN 2023
NILAI EVALUASI AKIP

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		
			TARGET		TARGET		TARGET		%	TARGET	%
1.	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bakam	Indeks	CC	B	BB	B	BB	B	100	BB	100

Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah dapat dilihat dari 1 (satu) indikator, sebagai berikut :

1. Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bakam

Analisis pencapaian Indikator Nilai Evaluasi AKIP

Capaian kinerja nyata indikator nilai evaluasi AKIP adalah BB dimana targetnya BB yang direncanakan dalam perjanjian kinerja tahun 2023, sehingga persentase capaian kinerja adalah 100% atau sesuai dengan target yang dijanjikan.

Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh 1 (satu) Program, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dimana output program tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran.

Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, ANGGARAN
DAN OUTPUT YANG DIHASILKAN

N O	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	OUTPUT	MENUNJANG/KURANG	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.620.000	10.005.000	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar 2. Persentase pelaporan	Sangat menunjang	100 100

				kinerja yang disusun sesuai standar		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.520.000	2.345.000	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		6 Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.095.000	1.095.000	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA- SKPD		5 Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.320.000	1.320.000	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		2 Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.020.000	1.020.000	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA- SKPD		2 Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1.095.000	795.000	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		2 Dokumen
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.430.000	2.290.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		3 Laporan
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.140.000	1.140.000	Jumlah laporan evaluasi kinerja		8 Laporan

					Perangkat Daerah		
		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.655.531.541	1.494.943.065	Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar	Sangat menunjang	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.638.911.541	1.471.888.800	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan		16 orang/bulan
		Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.640.000	14.632.726	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD		12 dokumen
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	990.000	990.000	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		2 laporan
		Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	990.000	990.000	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD		40 laporan
		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53.230.000	52.919.000	Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	Sangat menunjang	100
		Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	38.200.000	37.989.000	- Pakaian Sipil Lengkap - Pakaian batik tradisional - Pakaian olahraga - Pakaian paskibra		1 stell 45 stell 10 stell 10 stell
		Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1.600.000	1.500.000	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian		11 dokumen
		Sub Kegiatan Pendidikan	13.430.000	13.430.000	Jumlah pegawai		4 orang

		dan Pelatihan Sub Kegiatan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		
		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	249.951.187	229.862.535	Persentase arsip perangkat daerah yang dikelola sesuai peraturan	Sangat menunjang	100
		Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.591.187	172.629.000	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		12 laporan
		Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.680.000	28.554.267	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		12 dokumen
		Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28.680.000	28.679.268	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		12 dokumen
		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.126.280	48.900.000	Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	Sangat menunjang	100
		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	33.142.500	28.700.000	Jumlah paket mebel yang disediakan - Kursi kerja - Kursi rapat - Meja kerja - Meja rapat		4 unit 50 unit 4 unit 2 unit
		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.983.780	20.200.000	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan - Laptop - Printer		1 unit 2 unit
		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.332.803	320.585.633	Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah	Sangat menunjang	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	231.860.925	229.518.896	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat		12 laporan
		Penyediaan Jasa Komunikasi,	35.827.620	31.940.477	Jumlah laporan penyediaan		12 laporan

		Sumber Daya Air dan Listrik			jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.644.258	59.126.260	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		12 laporan
		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.480.000	307.896.118	Persentase BMD dalam kondisi baik	Sangat menunjang	100
		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.700.000	100.611.118	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		9 unit
		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000	7.180.000	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		21 unit
		Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.980.000	200.105.000			5 unit

Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kecamatan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Dana yang cukup memadai;
2. Sarana yang cukup untuk mendukung kegiatan;
3. Kerjasama yang baik antara aparat.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya SDM yang mengerti tentang Perencanaan dan Keuangan;
2. Kurangnya Pelatihan dalam Perencanaan;
3. Kurangnya SDM yang mengerti tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Kecamatan, berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan tersebut :

1. Mengajukan permohonan ke BKD untuk pendidikan dan pelatihan aparatur bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023, dan ditambahkan dengan perubahan anggaran berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022, maka untuk OPD Kantor Kecamatan Bakam dianggarkan sebesar Rp. 2.832.284.441,00 meliputi :

1. Belanja sebesar Rp. 2.832.284.441,00

Belanja yang dianggarkan sebesar Rp. 2.832.284.441,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan OPD Kantor Kecamatan Bakam Tahun Anggaran 2023 meliputi :

- a) Belanja Operasi sebesar Rp. 2.832.284.441,00
 - Belanja Pegawai Rp. 1.649.671.541,00
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 926.936.620,00
- b) Belanja Modal sebesar Rp. 255.676.280,00

Mengacu pada DPA dan DPPA OPD Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023, anggaran sebagaimana tersebut diatas, telah terealisasi sebagai berikut :

1. Belanja direalisasikan sebesar Rp. 2.832.284.441,00 atau 92,31% dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Operasi sebesar Rp. 2.576.608.161,00 atau 91,84%
 - Belanja Pegawai Rp. 1.649.671.541,00 atau 89,77%
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 926.936.620,00 atau 95,53%
 - b. Belanja Modal sebesar Rp. 255.676.280,00 atau 97,01%

Dengan data tersebut diatas dikatakan tahun 2023 serapan anggaran untuk OPD Kantor Kecamatan Bakam dapat dikatakan baik.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
RINCIAN PAGU DAN REALISASI ANGGARAN

NO	TUJUAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%
1	Meningkatkan Kemandirian Desa di Kecamatan Bakam	2.832.284.441,00	2.614.369.092,00	92,31%

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka pada tahun 2023.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Kantor Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.7
EFEKTIFITAS ANGGARAN TERHADAP CAPAIAN MISI
KANTOR KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA TAHUN 2023

NO	KATEGORI	JUMLAH INDIKATOR	PRESENTAS E CAPAIAN KINERJA	ANGGARAN	
				REALISASI (RP.)	%
	MISI	2			
1.	Melebihi/Melampaui Target	-		2.832.284.441,00	92,31%
2.	Sesuai Target	3	100%		
3.	Tidak Mencapai Target	-			

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kalau dilihat dari Kinerja Program/Kegiatan Kantor Kecamatan Bakam pada tahun anggaran 2023, semua Program dan Kegiatan yang dilaksanakan boleh dikatakan cukup berhasil dalam pencapaian target yang telah ditentukan yaitu persentase rata – rata realisasi indikator kinerja sebesar 100%, begitu pula kalau dilihat dari tingkat serapan anggaran yaitu :

Belanja direalisasikan sebesar Rp. 2.614.369.092,00 atau 92,31% dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Operasi sebesar Rp. 2.366.344.092,00 atau 91,84%
 - Belanja Pegawai Rp. 1.480.848.800,00 atau 89,77%
 - Belanja Barang dan Jasa Rp. 885.495.292,00 atau 95,53%
 - Belanja Hibah Rp. -
- b. Belanja Modal sebesar Rp. 248.025.000,00 atau 97,01%
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 48.900.000,00 atau 87,83%
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 199.125.000,00 atau 99,56%

Kinerja OPD Kecamatan Bakam pada tahun 2023 pencapaiannya sesuai target karena kami berasumsi bahwa pencapaian target kinerja kami didasarkan pada pencapaian indikator kegiatan yang telah dilakukan yaitu pencapaian rata-rata sebesar 100%.

B. Rencana Tindak Lanjut

Setelah disusunnya laporan kinerja organisasi ini dan setelah dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan maka dapat di ambil rencana tindak lanjut :

1. Mempertahankan apa yang telah dicapai serta berusaha meningkatkan kinerja.

2. Menyusun dokumen perencanaan dengan baik.
3. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

LAMPIRAN :

1. *PERJANJIAN KINERJA 2023*
2. *LAPORAN CAPAIAN KINERJA KEC. BAKAM TAHUN 2023*



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASWAN, SH
Jabatan : CAMAT BAKAM

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : MULKAN, SH., MH
Jabatan : BUPATI BANGKA

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA




MULKAN, SH., MH

Sungai, 30 Januari 2023
PIHAK PERTAMA




ASWAN, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19690102 199303 1 007

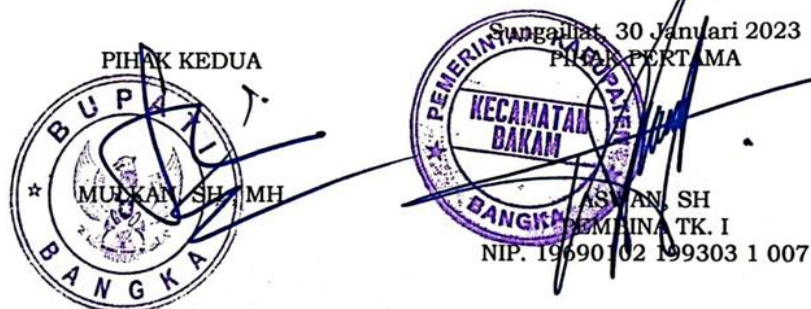
Dipindai dengan CamScanner

PERJANJIAN KINERJA

SKPD : KECAMATAN BAKAM
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/2015)	%	100
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Kec.Bakam	Kategori /Nilai	BB (71,80)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.187.935.350,00	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	20.750.000,00	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	110.735.630,00	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.100.000,00	APBD
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	56.300.000,00	APBD
	TOTAL	3.385.820.980,00	


 Sanggalat, 30 Januari 2023
 PIHAK PERTAMA
 KECAMATAN BAKAM
 BANGKAI
 ASWAN, SH
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19690102 199303 1 007

Dipindai dengan CamScanner



**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN BAKAM KABUPATEN BANGKA**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDWAN, S. PKP
Jabatan : CAMAT BAKAM

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : M. HARIS. AR, AP, MH
Jabatan : PJ. BUPATI BANGKA

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



M. HARIS. AR, AP, MH

Bakam, 01 Nopember 2023
PIHAK PERTAMA



RIDWAN, S. PKP
PENATA TINGKAT I
NIP. 197910152010011008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : KECAMATAN BAKAM
TAHUN ANGGARAN : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Desa	Persentase Desa Berkembang (Permendagri 81/ 2015)	%	100
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Bakam	Kategori / Nilai	BB (71,80)

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.663.271.811,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 12.845.000,00	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 110.735.630,00	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 8.300.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 37.132.000,00	APBD
	TOTAL	Rp. 2.832.284.441,00	

PIHAK KEDUA

**M. HARIS. AR, AP, MH**

Bakam, 01 Nopember 2023

PIHAK PERTAMA

**RIDWAN, S. PKP**

PENATA TINGKAT I

NIP. 197910152010011008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAPORAN KINERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

URUSAN PEMERINTAHAN	: 7. UNSUR KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN	: 7.01. KECAMATAN
ORGANISASI	: 7.01.0.00.00-05.0000 KECAMATAN BAKAM
SUB UNIT ORGANISASI	: 7.01.0.00.00-05.0000 KECAMATAN BAKAM
PROVINSI/KABUPATEN	: KEPULAUAN BANGKA BELITUNG / BANGKA

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	BELANJA		HASIL/KELUARAN			KETERANGAN
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	RENCANA	REALISASI	SATUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
7 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.663.271.811,00	2.458.669.812,00				
7 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.620.000,00	10.005.000,00				
7 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.520.000,00	2.345.000,00				
	Masukan : Jumlah dana	2.520.000,00	2.345.000,00			Rupiah	
	Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah			6	6	Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun 6 Dokumen
							Dokumen renja 1 Dokumen
							Dokumen perubahan 1 Dokumen
							Dokumen renstra 1 Dokumen
							Perjanjian kinerja 1 Dokumen
							Perjanjian kinerja perubahan 1 Dokumen
							Rencana Aksi 1 Dokumen
	Hasil : Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar			100	100	Persentase	
7 01 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.095.000,00	1.095.000,00				
	Masukan : Jumlah dana	1.095.000,00	1.095.000,00			Rupiah	
	Keluaran : Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD			5	5	Dokumen	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 5 Dokumen
							Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen
							Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD 4 Dokumen
	Hasil : Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar			100	100	Persentase	
7 01 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.320.000,00	1.320.000,00				
	Masukan : Jumlah dana	1.320.000,00	1.320.000,00			Rupiah	

						Keluaran : Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD			2	5	Dokumen	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan	2 Dokumen
												Dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
												Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen
						Hasil : Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar			100	100	Persentase		
7	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.020.000,00	1.020.000,00					
						Masukan : Jumlah dana	1.020.000,00	1.020.000,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD			2	2	Dokumen	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD	2 Dokumen
												Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
												Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
						Hasil : Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar			100	100	Persentase		
7	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.095.000,00	795.000,00					
						Masukan : Jumlah dana	1.095.000,00	795.000,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD			2	2	Dokumen	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen
												Dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
												Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
						Hasil : Persentase perencanaan kinerja yang disusun sesuai standar			100	100	Persentase		

7	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.430.000,00	2.290.000,00						
						Masukan : Jumlah dana	2.430.000,00	2.290.000,00				Rupiah		
						Keluaran : Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			3	3	Laporan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3 Laporan	
												Laporan capaian kinerja PD	1 Laporan	
												Laporan Tahunan PD	1 Laporan	
												LKPJ PD	1 Laporan	
						Hasil : Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai standar			100%	100%	Persentase			
7	01	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.140.000,00	1.140.000,00						
						Masukan : Jumlah dana	1.140.000,00	1.140.000,00				Rupiah		
						Keluaran : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			8	8	Laporan	Keluaran : Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	8 Laporan	
												Evaluasi renja SKPD	4 Laporan	
												Evaluasi rencana aksi	4 Laporan	
						Hasil : Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja sesuai standar			100%	100%	Persentase			
7	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.655.531.541,00	1.488.501.526,00						
7	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.638.911.541,00	1.471.888.800,00						
						Masukan : Jumlah dana	1.638.911.541,00	1.471.888.800,00				Rupiah		
						Keluaran: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan			16	16	Orang/ Bulan	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	16 Orang/ Bulan	
						Hasil : Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar			100	100	Persentase			
7	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.640.000,00	14.632.726,00						
						Masukan : Jumlah dana	14.640.000,00	14.632.726,00				Rupiah		

						Keluaran: Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			12	12	Dokumen	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen
						Hasil : Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar			100	100	Persentase		
7	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	990.000,00	990.000,00					
						Masukan : Jumlah dana	990.000,00	990.000,00			Rupiah		
						Keluaran: Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			2	2	Laporan	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan	2 Laporan
												Laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Laporan
												Notulen rapat penyusunan laporan keuangan akhir tahun	1 Laporan
						Hasil : Persentase pelaporan keuangan yang disusun sesuai standar			100	100	Persentase		
7	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	990.000,00	990.000,00					
						Masukan : Jumlah dana	990.000,00	990.000,00			Rupiah		
						Keluaran: Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD			40	40	Laporan	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	40 Laporan
												Laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Laporan
												Laporan fisik dan keuangan	12 Laporan
												Laporan aset semesteran	2 Laporan
												Laporan persediaan bulanan	12 Laporan

LAKIN KECAMATAN BAKAM TAHUN 2023

51

7	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	192.591.187,00	172.629.000,00					
						Masukan : Jumlah Dana	192.591.187,00	172.629.000,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			12	12	Laporan	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan
						Hasil : Persentase arsip perangkat daerah yang dikelola sesuai peraturan			100	100	persentase		
7	01	01	2	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28.680.000,00	28.554.267,00					
						Masukan : Jumlah Dana	28.680.000,00	28.554.267,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD			12	12	Dokumen	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12 Dokumen
						Hasil : Persentase arsip perangkat daerah yang dikelola sesuai peraturan			100	100	persentase		
7	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28.680.000,00	28.679.268,00					
						Masukan : Jumlah Dana	28.680.000,00	28.679.268,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD			12	12	Dokumen	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	12 Dokumen
						Hasil : Persentase arsip perangkat daerah yang dikelola sesuai peraturan			100	100	persentase		
7	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	56.126.280,00	48.900.000,00					
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Mebel	33.142.500,00	28.700.000,00					
						Masukan : Jumlah dana	33.142.500,00	28.700.000,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah paket mebel yang disediakan			6	4	Paket	Kursi kerja	4 unit
												Kursi rapat	50 Unit
												Meja kerja	4 unit
												Meja rapat	2 Unit
						Hasil : Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah			100	100	Persentase		
7	01	01	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.983.780,00	20.200.000,00					
						Masukan : Jumlah dana	22.983.780,00	20.200.000,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan			6	3	Unit	Laptop	1 unit

						Hasil : Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah			100	100	Persentase	Printer	2 Unit
7	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	327.332.803,00	320.585.633,00					
7	01	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	231.860.925,00	229.518.896,00					
						Masukan : Jumlah dana	231.860.925,00	229.518.896,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			12	12	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan
						Hasil : Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah			100	100	Persentase		
7	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.827.620,00	31.940.477,00					
						Masukan : Jumlah Dana	35.827.620,00	31.940.477,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan			12	12	Bulan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber	12 Laporan
						Hasil : Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah			100	100	Persentase		
7	01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	59.644.258,00	59.126.260,00					
						Masukan : Jumlah dana	59.644.258,00	59.126.260,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan			12	12	Laporan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Bulan
						Hasil : Persentase pemenuhan sarana pendukung kinerja perangkat daerah			100	100	Persentase		
2	11	2	12	01	01	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.480.000,00	307.896.118,00					
2	12	2	12	01	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.700.000,00	100.611.118,00					
						Masukan : Jumlah dana	101.700.000,00	100.611.118,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang			9	9	unit	Kendaraan dinas roda 2	7 Unit
												Kendaraan dinas roda 4	2 Unit
						Hasil : Persentase BMD dalam kondisi baik			100	100	Persentase		
2	11	2	12	01	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.800.000,00	7.180.000,00					
						Masukan : Jumlah Dana	7.800.000,00	7.180.000,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara			21 Unit	21 Unit	Unit	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	21 unit
						Hasil : Persentase BMD dalam kondisi baik			100	100	Persentase		

2	11	2	12	01	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.980.000,00	200.105.000,00					
						Masukan : Jumlah Dana	200.980.000,00	200.105.000,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi			5 Unit	5 Unit	Unit	GSG	1 Unit
												Kantor kecamatan	1 Unit
												Rumah dinas camat	1 Unit
												Rumah dinas staf	2 Unit
						Hasil : Persentase BMD dalam kondisi baik			100	100	Persentase		
7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	12.845.000,00	11.300.000,00					
7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	12.845.000,00	11.300.000,00					
7	01	02	2	04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintah Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	12.845.000,00	11.300.000,00					
						Masukan : Jumlah Dana	12.845.000,00	11.300.000,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan			12	12	Laporan		
						Hasil : Persentase pelayanan yang diselesaikan			100	100	Persentase		
7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	110.735.630,00	106.807.280,00					
7	01	03	2	01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	10.320.000,00	9.605.000,00					
7	01	03	2	01	03	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	10.320.000,00	9.605.000,00					
						Masukan : Jumlah Dana	10.320.000,00	9.605.000,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam			63	63	Lembaga		
						Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina			100	100	Persentase		
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100.415.630,00	97.202.280,00					
						Masukan : Jumlah Dana	100.415.630,00	97.202.280,00			Rupiah		
						Keluaran : Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			26	26	Laporan		
						Hasil : Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina			100	100	Persentase		
7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	8.300.000,00	7.850.000,00					
7	01	04	2	03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	8.300.000,00	7.850.000,00					

[illegible]